

Judul : Cegah WNI Jadi Korban Konflik Israel-Palestina
Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Cegah WNI Jadi Korban Konflik Israel-Palestina

Kemenlu Kudu Siapkan Evakuasi Secepatnya

Konflik Israel-Palestina dalam beberapa hari terakhir masih memanas. Senayan meminta Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di sana.

KETUA DPR Puan Maharani mengatakan, Pemerintah juga harus memastikan warga negara kita di sana dalam kondisi aman, tidak kekurangan bahan pokok. "Karena selama perang, kebutuhan pokok sangat sulit sekali untuk didapat. Negara harus hadir memberikan bantuan secepatnya," ucap Puan, kemarin.

Diketahui, perang di Jalur Gaza yang tak terhentikan terjadi pada hari Sabtu (7/10), dengan kondisi saling serang antarkedua negara. Akibat eskalasi konflik Israel dan Palestina kali ini, setidaknya sudah hampir seribu orang meninggal dunia. Serangan dari kedua belah pihak juga menyebabkan ribuan warga terluka.

Sementara itu menurut catatan resmi Kemenlu, terdapat 13 orang WNI yang menetap di wilayah sekitar Jalur Gaza. Mereka merupakan relawan kemanusiaan. Kemenlu diharapkan siap melakukan evakuasi bila diperlukan untuk melindungi warga Indonesia yang berada di wilayah tersebut.

"Jika memungkinkan dan memang harus dilakukan, Pemerintah harus mengambil langkah responsif dengan upaya evakuasi warga negara kita agar tidak menjadi korban peperangan," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Ia pun turut menyampaikan keprihatinan dengan apa yang dialami korban atas kejadian saling serang antara kelompok

militer Hamas dengan Israel. Indonesia harus mengambil langkah proaktif dalam mewujudkan perdamaian Israel-Palestina. Apalagi, situasi konflik yang terjadi saat ini disebut cukup besar dan kondisinya lebih mencekam dari serangan sebelum-sebelumnya.

Sementara, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon meminta semua pihak obyektif dan adil dalam memberikan pernyataan. Yaitu, agar semua pihak dapat meredakan kekerasan yang dapat menimbulkan korban sipil di kedua belah pihak. Oleh karena, apa yang terjadi sekarang ini akibat diamnya dunia internasional dan PBB atas penindasan yang dilakukan Israel atas rakyat dan tanah Palestina.

"Serbuan Hamas atas Israel adalah akibat penyerangan penduduk Israel yang terus menerus terhadap Masjid Al-Aqsa, aneksasi atas tanah warga

Palestina, provokasi sentimen anti-Palestina, Yahudisasi yang terus meluas, dan blokade dan isolasi Jalur Gaza sejak tahun 2006 yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah," ujar Fadli.

Ia menyebut, Hamas tidak bisa disebut sebagai teroris. Di sisi lain, ia menjelaskan contoh kejahatan Israel sepanjang tahun 2023. "Jangan lupa bahwa menurut PBB sejak awal 2023 Israel telah membunuh hampir 300 warga Palestina di Tepi Barat. Demikian juga provokasi penyerbuan sekitar 4.000 pemukim Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa sepanjang Juni lalu. Namun sayang, dunia internasional tak melakukan langkah konkret apa pun, termasuk PBB," tukas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Fadli meminta komunitas internasional untuk berintrospeksi. "Saya menekankan bahwa apa yang tengah terjadi sekarang

jelas-jelas sinyal dari kegagalan komunitas internasional termasuk PBB, negara-negara besar, dan lemahnya penegakan tatanan dunia berbasis aturan. Selama ini, berbagai kejahatan Israel seperti dibiarkan komunitas global termasuk PBB," tandas anggota Komisi I DPR ini.

Senada, Wakil Ketua BKSAP DPR Sukamta mengimbau Pemerintah Indonesia untuk bisa mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) lebih tegas terhadap Israel dan lebih maksimal mendukung Palestina. Ini mengingat, penjajahan yang terus menerus pasti akan memunculkan kekerasan dan pada gilirannya akan menjadi siklus yang melahirkan kekerasan baru.

"Maka perdamaian dan implementasi dua negara berdampingan secara berdaulat adalah solusi damai yang lebih abadi," tegas Sukamta. ■ KAL